



Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN

Tahun Anggaran
2025



**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN TAHUNAN

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN
2025**



**BALAI BESAR PRAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2026**

Laporan Tahunan
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
2025

Penyunting : Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P.
Laila Kadar, S.E., M.Si

Redaksi Pelaksana : Muhamad Hanafi, S.TP., M.Si
Tatiek Kartika Swara Mahardika, S.TP., M.Si

Penerbit: Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar No. 12
Telepon: 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920
<https://pascapanen.brmp.pertanian.go.id/>

Dicetak atas biaya DIPA BBPM Pascapanen TA.2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen Pertanian) TA.2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tahunan ini merupakan laporan tahunan pertama sejak Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian bertransformasi menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BBPM Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun di bidang Perakitan dan Modernisasi pascapanen pertanian dalam perencanaan program, evaluasi, pengelolaan keuangan, manajerial, teknis, pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian dan capaian kegiatan strategis termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BBPM Pascapanen juga telah melaksanakan sejumlah layanan pengujian analisis sampel di Laboratorium, perumusan RSNI, Bimbingan teknis, magang dan praktek kerja lapang (PKL), serta layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan terkait pascapanen pertanian. Nilai indeks unit pelayanan pengujian pada TA. 2025 mencapai nilai 3,54 setara dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88,49 termasuk kategori mutu pelayanan **A** atau kinerja unit pelayanan dengan kategori **Sangat Baik**. Responden pelanggan layanan analisis uji laboratorium yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Wiraswasta, PNS, dan Pengusaha.

Indikator kinerja utama program dukungan manajemen berdasarkan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan SMART/DJA dengan target 82 (nilai), dan hasil evaluasi silang oleh Tim Penilai lingkup BRMP mencapai

nilai 90,06 (109,83% dari target). Sedangkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mencapai nilai 97,14 tercapai 105,08% dari target 92,44.

Buku Laporan Tahunan BBPM Pascapanen TA. 2025 ini diharapkan menjadi sarana penyampaian informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPM Pascapanen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan tersebut dapat terlaksana atas kerja sama dan partisipasi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan laporan tahunan BBPM Pascapanen Pertanian TA. 2025. Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak keterbatasan dalam penyajian informasi, kami harapkan masukan dan saran yang dapat meningkatkan kinerja BBPM Pascapanen di tahun berikutnya. Selain itu, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan acuan dalam menyusun rencana kerja pada tahun tahun berikutnya.



Kepala Balai Besar,

Dr. Zainal Abidin, SP., M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. PROFIL BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN	3
2.1. Sarana dan Prasarana.....	4
2.2. Sumber Daya Manusia	5
2.3. Pengembangan Kompetensi SDM.....	7
III. PROGRAM DAN ANGGARAN	9
3.1. Program dan Sasaran Kegiatan	9
3.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA.2025	10
3.3. Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran TA.2025	12
IV. STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN BIDANG PERTANIAN	14
4.1. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	14
4.2. Pengujian dan Sertifikasi	15
4.2.1. Operasionalisasi LSPro.....	15
4.2.2. Operasionalisasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).....	16
4.2.3. Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium	20
4.2.4. Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia.....	22
V. DUKUNGAN MANAJEMEN.....	27
5.1. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	27
5.2. Pelaksanaan Pengelolaan BMN.....	30
5.3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.....	31
5.4. Pelaksanaan Monev, SPI, Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi.....	43
5.4.1. Sosialisasi SPI lingkup BBPM Pascapanen	43
VI. PERAKITAN, PEREKAYASAAN, DAN MODERNISASI PERTANIAN	47
6.1. Perakitan dan Perekayasaan Teknologi Pascapanen Pertanian.....	47

6.2. Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee: <i>Codex Committee on Pesticide Residue</i> (CCPR)	51
6.3. Penyusunan Pohon Industri Komoditas Pertanian Strategis	51
6.4. Klinik Modernisasi Pertanian.....	52
VII. KINERJA ANGGARAN.....	54
VIII. PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Diklat Jangka Pendek/Pelatihan Tahun 2025.....	7
Tabel 2. Rencana Kerja BBPM Pascapanen TA.2025	10
Tabel 3. Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen pada PK Awal dan Revisi Akhir Tahun 2025	11
Tabel 4. Anggaran BBPM Pascapanen pada PK awal dan revisi akhir Tahun 2025	11
Tabel 5. Revisi DIPA BBPM Pascapanen Pertanian	12
Tabel 6. Rekapitulasi komoditas, lokasi, dan waktu pengambilan sampel.....	23
Tabel 7. Target optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk swasembada pangan di BBPM Pascapanen sesuai SK Tahun 2025	28
Tabel 8. Luasan Optimasi Lahan per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2025	29
Tabel 9. Capaian Pertanaman MT I – IV di Kabupaten Banyuasin.....	30
Tabel 10. Target dan realisasi optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk swasembada pangan di BBPM Pascapanen sesuai SK Tahun 2025	30
Tabel 11. Layanan konsultasi dalam kurun waktu Januari-Desember 2025.....	32
Tabel 12. Daftar kunjungan selama Tahun 2025	33
Tabel 13. Peserta magang/PKL Tahun 2025	33
Tabel 14. Nilai Kepuasan Masyarakat Triwulan I – IV Tahun 2025	40
Tabel 15. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Triwulan I – IV Tahun 2025	41
Tabel 16. Nilai survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat pada setiap unsur pada Triwulan I - IV Tahun 2025	41
Tabel 17. Nilai survei persepsi anti korupsi (SPAK) pada setiap unsur pada Triwulan I - IV Tahun 2025	42
Tabel 18. Laporan Gratifikasi Tahun 2025	45
Tabel 19. Rekapitulasi pengaduan masyarakat Tahun 2025	46
Tabel 20. Realisasi anggaran BBPM Pascapanen	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPM Pascapanen Pertanian.....	4
Gambar 2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Gambar 3. Berdasarkan Keragaan Jabatan	6
Gambar 4. Berdasarkan Keragaan Jenis kelamin	7
Gambar 5. Sertifikat akreditasi LPH BBPM Pascapanen.....	17
Gambar 6. Kegiatan koordinasi internal dan audiensi LPH	17
Gambar 7. Sertifikat akreditasi Lab.BBPM Pascapanen	21
Gambar 8. Penghargaan <i>Most Outstanding Country Winners AFACI 2025</i>	26
Gambar 9. Pameran Indogritech 2025	34
Gambar 10. Pameran Agrifest 2025	35
Gambar 11. Pameran HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Nelayan Indonesia)	36
Gambar 12. Pelaksanaan FGD Beras	38
Gambar 13. Pelatihan pelayanan prima di BBPM Pascapanen.....	39
Gambar 14. Sertifikat keterbukaan informasi publik	43
Gambar 15. SOP Pengolahan Kentang dan Penerapan Teknologi Pengolahan Kentang	48
Gambar 16. Unit Produksi Tepung Beras dan Produk Tepung Beras “Teratai”	49
Gambar 17. Bimbingan teknis (Bimtek) SOP Penanganan pascapanen jagung kepada petani	50
Gambar 18. Sosialisasi praktik aplikasi label indikator warna untuk kesegaran daging	51
Gambar 19. Contoh Pohon Industri Komoditas Cabai Merah.....	52
Gambar 20. Bimbingan Teknis KMP Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur.....	53
Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran BBPM Pascapanen Tahun 2025 pada aplikasi MONEV SMART-KEU DJA.....	54

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sesuai Renstra 2025 - 2029, maka visi dan misi BBPM Pascapanen mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian dan prioritas program BRMP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi dalam mendukung ketahanan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dibentuklah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Kementerian Pertanian. Pada Bab XII Pasal 245 Permentan tersebut, BRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Sedangkan fungsi BRMP adalah: a) penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; d) pelaksanaan administrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) merupakan salah satu unit pengelola teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 27 Maret 2025, BBPM Pascapanen mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut, BBPM Pascapanen menyelenggarakan fungsi : a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; c) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; d) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; e) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPM Pascapanen.

Peran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) sebagai institusi di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sangat penting sejalan dengan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan prioritas peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dilaksanakan melalui kegiatan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. Sementara itu, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dilakukan melalui kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pascapanen pertanian. Ruang lingkup bidang pascapanen pertanian yang cukup luas merupakan salah satu posisi strategis sebagai kontribusi BBPM Pascapanen dalam pembangunan pertanian pada saat ini dan masa yang akan datang.

II. PROFIL

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BBPM Pascapanen terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. BBPM Pascapanen memberikan beberapa layanan utama, di antaranya: 1) layanan pengujian laboratorium; 2) layanan penyelenggara uji profisiensi (PUP) beras; 3) layanan perumusan RSNI; 4) layanan sertifikasi halal; 5) layanan sertifikasi produk, proses, dan jasa (LSPro)/layanan PPC; 6) layanan konsultasi; 7) layanan magang teknis; 8) layanan narasumber; dan 9) layanan perakitan dan perekayasa teknologi pascapanen pertanian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa laboratorium yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Sarana laboratorium berfungsi sebagai layanan dan pengujian untuk menunjang optimalisasi dan kualitas kinerja, yaitu Laboratorium Kimia, Fisika, Nanoteknologi, Mikrobiologi yang berlokasi di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealiala berlokasi di Karawang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 serta menjadi laboratorium rujukan pengujian mutu beras di Indonesia.

Susunan organisasi BBPM Pascapanen terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- kelompok jabatan fungsional terkait perakitan dan modernisasi yaitu analis standar, pengawas mutu hasil pertanian, analis kebijakan, dan teknisi litkayasa;
- kelompok jabatan fungsional terkait manajemen yaitu perencana, pranata humas, arsiparis, analis kepegawaian, analis pengelola keuangan APBN dan pustakawan. Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPM Pascapanen Pertanian

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana BBPM Pascapanen mempunyai dua fungsi yang meliputi gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium yang berlokasi di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPM Pascapanen yang berada di Bogor adalah Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan nomor sertifikat PUP-024 IDN.

Laboratorium BBPM Pascapanen berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standarisasi instrumen pascapanen pertanian, (ii) laboratorium pengujian/jasa analisis untuk menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan sebagai bentuk optimalisasi aset negara bagi kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan

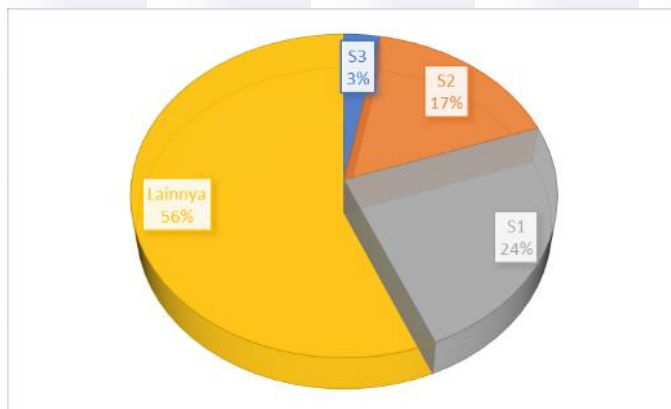
studi banding, dan (iv) laboratorium rujukan. Laboratorium BBPM Pascapanen telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian yang mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017. Beberapa peralatan pada laboratorium akreditasi antara lain instrumen pengujian seperti HPLC, GC, spektrofotometer, amilograph, *texture analyzer*. Sedangkan laboratorium pengolahan menangani pengolahan aneka tepung, roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, ekstraksi atsiri dan bahan aktif, pengolahan daging, susu, bioprosesing dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar komoditas tanaman pangan (sereal dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur). Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan diantaranya ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (*spray drier, molen drier, far infra red drier*), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

BBPM Pascapanen juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPM Pascapanen Pertanian, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPM Pascapanen sebagai organisasi yang menjalankan fungsi standardisasi.

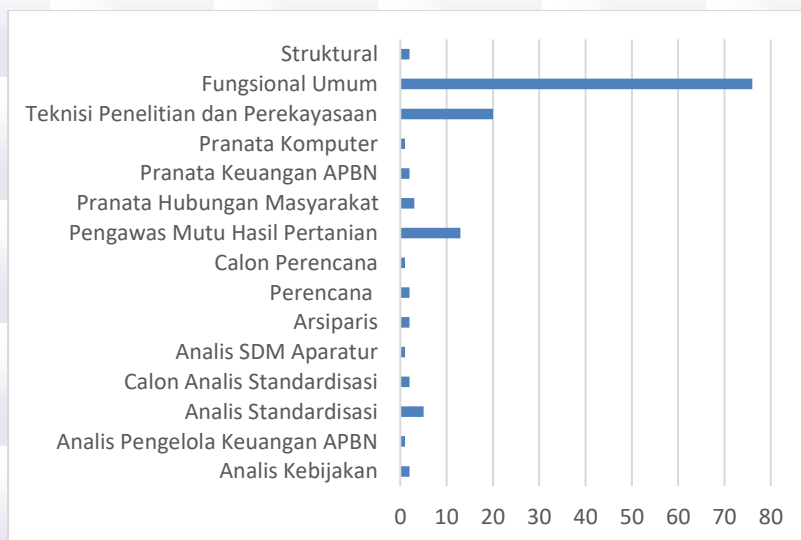
2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPM Pascapanen didukung oleh 133 pegawai yang terdiri dari: 84 orang PNS/CPNS yang profesional, 9 orang PPPK dan 37 orang PPPK paruh waktu, serta 3 orang PNPB dengan berbagai jenjang pendidikan (Gambar 2) dan jabatan. Sumberdaya manusia BBPM Pascapanen tersebar dalam berbagai jabatan fungsional yaitu pengawas mutu hasil pertanian (13 orang), teknisi litkayasa (20 orang), arsiparis (2 orang),

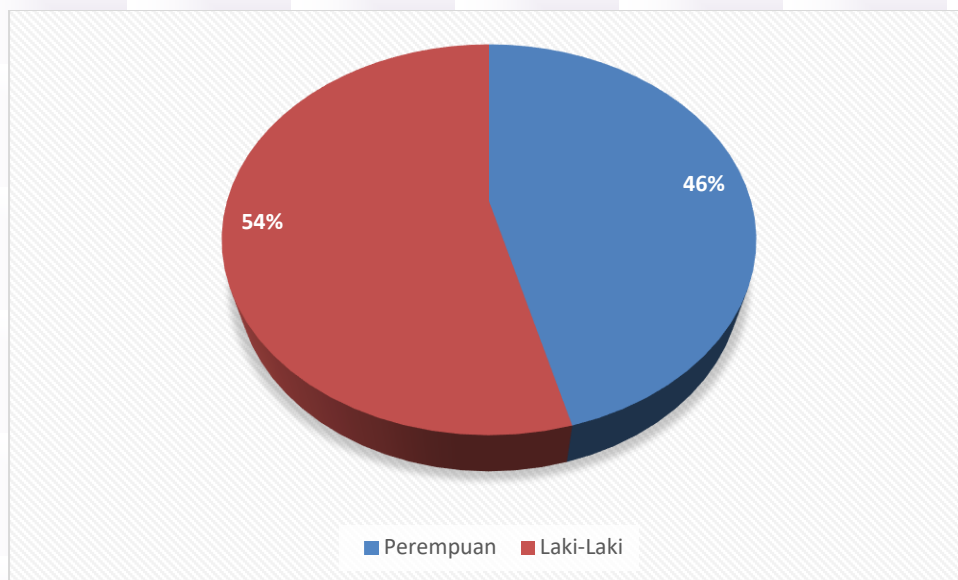
pranata komputer (1 orang), pranata humas (3 orang), analis SDM aparatur (1 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (1 orang), analis kebijakan (2 orang), perencana (2 orang), calon perencana (1 orang), pranata keuangan APBN (2 orang), analis standardisasi (5 orang), dan calon analis standardisasi (2 orang). Selebihnya merupakan fungsional umum sejumlah 76 orang. Komposisi SDM menurut jabatan dan gender sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 3. Berdasarkan Keragaan Jabatan



Gambar 4. Berdasarkan Keragaan Jenis kelamin

2.3 Pengembangan Kompetensi SDM

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi diperlukan dalam peningkatan mutu, profesionalisme untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing masing pegawai. Pada tahun 2025, beberapa pegawai BBPM Pascapanen telah mengikuti berbagai diklat peningkatan kompetensi seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Diklat Jangka Pendek/Pelatihan Tahun 2025

No	Nama Pelatihan	Tanggal pelatihan	Jumlah Peserta/nama	Tempat Pelatihan
1.	Pelatihan Proses Pengolahan dan Pengujian Mutu Aneka Tepung sesuai SNI	3 Februari 2025	16 Orang	BRMP Pascapanen
2.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1 Pengadaan Barang dan Jasa	7 -11 Juli 2025	Andini Ramadhani, S.AP., M.M.	BBPMKP Ciawi
3.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1 Pengadaan Barang dan Jasa	7 -11 Juli 2025	Marzuq Ziyad Emir, S.T.	BBPMKP Ciawi

No	Nama Pelatihan	Tanggal pelatihan	Jumlah Peserta/nama	Tempat Pelatihan
4.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1 Pengadaan Barang dan Jasa	7 -11 Juli 2025	Vincent Julius Kevin, A.Md.	BBPMKP Ciawi
5.	Pelatihan Proses Pengolahan dan Pengujian Mutu Aneka Tepung sesuai SNI	3 Februari 2025	17 Orang	BRMP Pascapanen
6.	SNI ISO 9001:2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu	Juni 2025	7 Orang	online
7.	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1 Pengadaan Barang dan Jasa	7 -11 Juli 2025	3 Orang	BBPMKP Ciawi
8.	Pelatihan Statistik PUP	14 Oktober 2025	30 Orang	BRMP Pascapanen
9.	Pelatihan Pelayanan Publik	Oktober 2025	1. Ahmad Saobari 2. Suhaemah 3. Afdan Irfandy, A.Md	Kementerian Pertanian
10.	Pelatihan APAR	November 2025	30 Orang	BRMP Pascapanen

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1 Program dan Sasaran Kegiatan

Program dan sasaran kegiatan BBPM Pascapanen difokuskan menghasilkan produk perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian dan standarisasi penilaian kesesuaian untuk penjaminan mutu dan keamanan pangan mendukung swasembada pangan dan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian. Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan diperlukan dukungan manajemen untuk meningkatkan kualitas serta pengelolaan perakitan dan modernisasi, standarisasi dan penilaian kesesuaian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, dan manajemen internal serta layanan umum.

Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPM Pascapanen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian, dengan indikator sasaran: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (target 3,20)
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPM Pascapanen (target 82)
3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan target 92,44 berdasarkan nilai indikator pelaksanaan anggaran pada aplikasi MONEV SMART-KEU Tahun 2025.

Target tersebut di atas dicapai melalui perencanaan kegiatan sebagaimana dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja BBPM Pascapanen TA.2025

Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan Output
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	200 Produk
7911.BJA.106	Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	200 Produk
018.09.WA 6918	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
6918.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
6918.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
6918.EBD	Layanan Manajemen Internal	1 Layanan
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan

3.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA.2025

Perjanjian Kinerja yang disusun adalah PK pada level Kepala UPT BBPM Pascapanen dalam melaksanakan mandat pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian serta Program Dukungan Manajemen. Perjanjian Kinerja (PK) BBPM Pascapanen pada awal tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.718.328.000,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selama tahun 2025, terjadi beberapa kali revisi PK karena adanya perubahan organisasi, pimpinan, dan alokasi anggaran di akhir tahun 2025. Rincian perubahan PK dan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Sasaran, Indikator, Target Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen pada PK Awal dan Revisi Akhir Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kegiatan	Target	
			Awal	Akhir
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	-	-
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	-	3,20 Indeks
3	Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	-	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian/ Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Standardisasi Instrumen/Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	82 Nilai	82 Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen/Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Balai Besar Pengujian Standar Instrumen/Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	85 Nilai	92,44 Nilai

Tabel 4. Anggaran BBPM Pascapanen pada PK awal dan revisi akhir Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
Total		Rp 15.718.328.000	Rp 17.249.479.000
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 616.756.000	Rp 1.109.798.000
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 616.756.000	-
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	-	Rp 1.109.798.000

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 15.101.572.000	Rp 16.139.681.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen/Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 15.101.572.000	Rp 16.139.681.000

3.3 Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran TA.2025

Pagu alokasi anggaran BBPM Pascapanen sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 24 SP DIPA- 018.09.2.648669/2025, Tanggal 2 Desember 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp15.718.328.000,- mencakup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Dukungan Manajemen. Seiring pelaksanaan kegiatan perlu adanya penyesuaian sehingga dilakukan revisi DIPA BBPM Pascapanen sebanyak 20 (dua puluh) kali. Revisi tersebut dilakukan dikarenakan perubahan kebijakan nasional lingkup Kementerian Pertanian termasuk BRMP agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat dicapai secara maksimal (Tabel 5). Sampai akhir tahun 2025, alokasi anggaran BBPM Pascapanen sebesar Rp17.249.479.000,-

Tabel 5. Revisi DIPA BBPM Pascapanen Pertanian

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
Total		Rp 15.718.328.000	Rp 17.249.479.000
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 616.756.000	Rp 1.109.798.000
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 616.756.000	-
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	-	Rp 1.109.798.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 15.101.572.000	Rp 16.139.681.000

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Awal	Akhir
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen/Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 15.101.572.000	Rp 16.139.681.000
	Blokir	Rp 976.756.000	Rp 343.900.000
	Anggaran Tersedia	Rp 14.741.572.000	Rp 16.905.579.000

IV. STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN BIDANG PERTANIAN

4.1 Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Standar instrumen pascapanen pertanian sangat diperlukan untuk menjamin mutu dari suatu proses dan produk hasil pertanian. Penerapan standar yang baik, akan mendorong potensi pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah dihasilkannya rumusan konsep RSNI sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan. Kegiatan ini telah diawali dengan koordinasi dan survei lapang secara terbatas untuk mengumpulkan informasi. Dalam rangka pencapaian output, maka tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain: 1) Koordinasi dengan komite teknis, stakeholder dan pihak terkait dalam penyusunan/revisi konsep RSNI, 2) Survei lokasi dan pengambilan sampel, 3) Melakukan pengujian dan 4) Penyusunan draft RSNI melalui konsensus dengan seluruh pihak terkait dan 5) Pelaporan.

Selama tahun 2025 BSIP/BBPM Pascapanen berkolaborasi dengan tim konseptor dan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertanian menghasilkan 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI3) yang telah ditetapkan sebagai SNI oleh Badan Standardisasi Nasional. Ketiga SNI yang telah dihasilkan antara lain: (1) Pedoman penanganan pascapanen lada putih (SNI 9422:2025); (2) Pedoman proses pascapanen jagung (*Zea mays* L.) menjadi beras jagung (SNI 9423:2025), dan (3) Pedoman proses pascapanen cabai (*Capsicum annuum* dan *Capsicum frutescens*) menjadi cabai kering (SNI 9424:2025).

4.2 Pengujian dan Sertifikasi

4.2.1 Operasionalisasi LSPro

Perkembangan pola hidup dan kebutuhan konsumen mensyaratkan adanya jaminan keamanan produk termasuk kehalalan produk sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat untuk produk yang dikonsumsi. Sedangkan dari sisi produsen, adanya jaminan keamanan dan kehalalan produk dapat semakin menyakinkan konsumen terutama telah adanya sertifikasi produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk sertifikasi produk yang tepat yaitu penerapan ISO:17065 sebagai panduan internasional tentang kriteria untuk lembaga yang akan menjalankan sistem sertifikasi produk. Sistem tersebut dijalankan mulai dari proses pembuatan produk, proses, hingga jasa. Lembaga sertifikasi harus memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sertifikasi produk merupakan suatu langkah konkrit dalam upaya peningkatan mutu/kualitas suatu produk dan berdaya saing. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 75/Permentan/OT.140/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 54/Permentan/PP.140/11/2016. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka LSPro Pascapanen pertanian diperlukan untuk menjamin mutu dan kualitas produk dengan membentuk unit layanan LSPro dan LPH di BBPM Pascapanen supaya mampu meningkatkan jumlah dan jenis layanan yang diberikan BBPM Pascapanen kepada mitra/stakeholder, sehingga menjadi layanan yang terintegrasi dengan layanan lainnya.

Pada tahap persiapan operasionalisasi LSPro, BBPM Pascapanen telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel dengan mengikuti beberapa pelatihan dan bimbingan teknis, yaitu: (1) Pelatihan pemahaman ISO 17065:2012, (2) Pelatihan pemahaman skema sertifikasi dan prosedur gula palma, (3) Pelatihan proses pengolahan dan pengujian mutu kakao (SNI 2323:2008); pati sagu dan tapioka (SNI 3729:2023 dan SNI 3451:2021); mutu

padi (SNI 6128:2020), dan (4) Pelatihan teknis untuk audit serta petugas pengambil contoh bidang pertanian.

Sebagai LSPro, pada tahun 2025 BBPM Pascapanen memiliki 14 ruang lingkup, yaitu untuk komoditas: 1) Beras (SNI 6128:2020); 2) Biji Kopi (SNI 01-2907:2008); 3) Gula Palma (SNI 3743:2021); 4) Tapioka (SNI 3451:2011); 5) Pati Sagu (SNI 3729:2023); 6) Tepung Mocaf (SNI 7622:2011); 7) Tepung Beras Ketan (SNI 447:2020); 8) Tepung Jagung (SNI 3727:2020); Tepung Kacang Hijau (SNI 01-3728:1995); 9) Tepung Singkong (SNI 01-2997:1996); 10) Tepung Beras (SNI 3549:2009); 11) Gula Kristal Mentah (SNI 3140:2020); 12) Gula Kristal Rafinasi (SNI 3140-2:2018); 13) Gula Kristal Putih (SNI 3140-3:2020); dan 14) Gula Kristal Putih (SNI 3140-3:2020). Sampai akhir tahun 2025, belum ada UKM yang memperoleh sertifikasi dari LSPro BRMP Pascapanen.

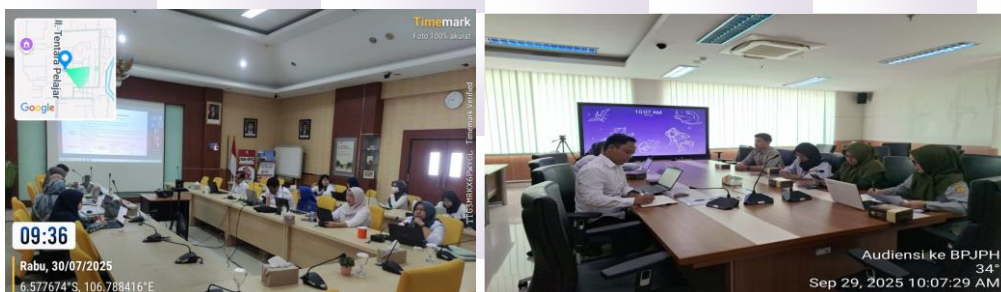
4.2.2 Operasionalisasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Sertifikat akreditasi LPH BBPM Pascapanen telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama pada tanggal 5 April 2024 dengan nomor akreditasi REG RI LH A-1P149 A00000000000000 10743224 (Gambar 5). Seiring dengan terbitnya sertifikat tersebut, maka LPH BBPM Pascapanen dapat melakukan persiapan operasionalisasi LPH dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI, registrasi auditor halal, integrasi siHalal, SOP dan pengaturan mekanisme keuangan LPH, mekanisme administrasi internal LPH, koordinasi dengan SDM Syariah, penetapan komite ketidakberpihakan dan perbaikan/perubahan struktur, tugas dan wewenang sesuai dengan perkembangan manajemen balai, sosialisasi dan promosi/pengenalan LPH, diskusi dan koordinasi dengan LPH lain terkait manajemen LPH.



Gambar 5. Sertifikat akreditasi LPH BBPM Pascapanen

Proses asesmen akreditasi LPH dilakukan oleh tim asesor dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang terdiri dari dua asesor teknis dan satu asesor syariah. Asesmen mengacu pada SNI ISO/EIC 17065: 2012, dan mengacu pada peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 1 Tahun 2023. Asesmen dilaksanakan secara luring atau lapangan (Gambar 6). Metode yang digunakan saat interview dengan SDM terkait, observasi, dan review rekaman dan dokumen.



Gambar 6. Kegiatan koordinasi internal dan audiensi LPH

LPH BBPM Pascapanen Pertanian telah berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan sertifikasi. LPH BBPM Pascapanen Pertanian memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi: 1) produk makanan, 2) produk minuman, 2) produk jasa penyembelihan, dan 4) produk kimiawi. Dalam tahun 2025, LPH BBPM Pascapanen Pertanian telah melaksanakan kegiatan pemeriksaaan halal terhadap sejumlah pelaku usaha di Jawa Barat. Meskipun secara keseluruhan ruang lingkup yang dimiliki mencakup empat bidang produk, namun hingga saat ini pelanggan yang aktif mengajukan sertifikasi didominasi oleh pelaku usaha di bidang produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan kebutuhan pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal, sekaligus menjadi indikator positif bagi kinerja LPH dalam menjalankan fungsi pemeriksaannya.

Hasil kegiatan kemitraan BRMP yang berjudul Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBPM Pascapanen Pertanian antara lain persyaratan sebagai LPH Utama yang telah terpenuhi, bertambahnya personel yang terdiri dari 1 SDM Syariah dan 1 auditor halal ruang lingkup jasa penyembelihan, kompetensi personel LPH BBPM Pascapanen Pertanian yang meningkat, serta sistem mutu dan layanan LPH BBPM Pascapanen Pertanian yang optimal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan LPH selama tahun 2025, diantaranya: 1) Persiapan Peningkatan Jenjang LPH Pratama ke Utama, melalui: a) Koordinasi Internal, b) Penyusunan GAP Analisis untuk Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Peningkatan Jenjang LPH Pratama ke LPH Utama, c) Studi Banding ke LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan, d) Audiensi ke BPJPH tentang Peningkatan jenjang LPH BBPM Pascapanen Pertanian menjadi LPH Utama, e) Kunjungan Audiensi *China Agricultural Industry Chamber of Commerce* (CAICC) tentang produksi makanan halal, f) Koordinasi

Kebutuhan Standar Halal di Indonesia, g) Koordinasi Pelatihan SDM LPH BBPM Pascapanen Pertanian dengan IHATEC (*Indonesia Halal Training and Education Center*), h) Koordinasi Audit Kehalalan Produk; 2) Sosialisasi dan Promosi LPH BBPM Pascapanen Pertanian ke Pelaku Usaha, melalui: a) Sosialisasi Layanan LPH BBPM Pascapanen Pertanian, b) Penyebaran Promosi LPH melalui media social, c) Promosi melalui Media Cetak dan Media Lainnya; 3) Peningkatan Kompetensi SDM LPH BBPM Pascapanen Pertanian, melalui: a) Peningkatan Kompetensi Teknis Personel LPH BBPM Pascapanen Pertanian, b) *Workshop from Gene to Fatwa*: Telaah Ilmiah Produk pangan Bioteknologi, c) Pelatihan SDM Syariah sesuai dengan ketentuan BPJPH dan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), d) Pelatihan Pengujian Mutu Beras, e) *Training: Enhancing Slaughterhouse Standards for Halal and Food Safety Compliance*, f) Pelatihan Auditor Halal Berbasis SKKNI; 4) Penambahan Personel LPH BBPM Pascapanen Pertanian, melalui: a) Penambahan Personel SDM Syariah, b) Penambahan Personel Auditor Halal Ruang Lingkup Jasa Penyembelihan; 5) Penjajakan Calon Klien dan Proses Pemeriksaan Halal untuk Memenuhi Persyaratan sebagai LPH Utama, melalui: a) Penjajakan dan Pendampingan Calon Klien LPH BBPM Pascapanen Pertanian: KWT Barokah, Rumah Singgah Disabilitas Mandiri, dan Kelompok Purbaya Tani Mandiri, b) Audit Pemeriksaan Halal ke Pelaku Usaha, terdapat 25 pelaku usaha yang terdaftar sebagai klien yang mengajukan sertifikat halal ke LPH BRMP Pascapanen.

Sampai dengan akhir tahun 2025, Sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat 31 pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi melalui SIHALAL pada akhir november 2024-2025. Seluruh pelaku usaha tersebut kemudian menjalani proses pemeriksaan halal oleh LPH BBPM Pascapanen. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi terdiri dari tiga jenis ruang lingkup usaha, yaitu makanan, minuman, dan jasa penyembelihan. Mayoritas pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal pada ruang lingkup makanan dan minuman yaitu sebanyak 27 ajuan, hal tersebut

menunjukkan tingginya kesadaran pelaku usaha sektor kuliner terhadap pentingnya penerapan standar halal pada produk yang mereka jual. Selain itu, terdapat 4 ajuan dari pelaku usaha pada ruang lingkup jasa penyembelihan. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan sektor kuliner, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha dalam bidang penyediaan jasa pemotongan hewan mulai tumbuh. Berdasarkan lokasi usahanya, pelaku usaha yang tercatat melakukan permohonan sertifikasi berasal dari 8 wilayah di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Majalengka, Kabupaten Majalengka, Kota Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan Kota Tasikmalaya.

Dari keseluruhan pelaku usaha, sebanyak 27 pelaku usaha telah menyelesaikan seluruh tahapan proses hingga memperoleh sertifikat halal, 4 pelaku usaha menunggu terbit nomor sertifikat halal dan masih menunggu jadwal audit.

4.2.3. Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium

Laboratorium Pengujian BBPM Pascapanen telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, meliputi laboratorium Kimia, Fisik dan Nanoteknologi, Mikrobiologi, serta Instalasi laboratorium mutu beras dan pascapanen sereal yang didukung oleh peralatan pengujian dan personel yang kompeten. Parameter dan matriks ruang lingkup akreditasi terdiri dari analisis proksimat (matriks susu bubuk dan biskuit), kadar amilosa (matriks tepung beras), partikel *size analyzer* (matriks cairan), kekentalan pati *Rapid Visco analyzer* (matriks bahan berpati), residu pestisida untuk malation dan klorpirifos (matriks sayur dan buah), Angka Lempeng Total (matriks teh dan tepung) serta mutu gabah dan beras. semua kegiatan pengujian selalu dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, guna memberikan jaminan konsistensi dan kompetensi teknis pengujian dalam ruang lingkup kegiatannya.

Laboratorium BBPM Pascapanen merupakan laboratorium kompeten yang terdaftar sebagai laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-366-IDN berlaku hingga 22 November 2030, dan sebagai laboratorium PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) ISO 17043:2023 dengan nomor PUP-024-IDN berlaku hingga 17 Desember 2029. Seperti terlihat pada Gambar 7. Sampai dengan tahun 2025, BBPM Pascapanen masih menjadi satu-satunya di Indonesia sebagai laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) dengan matriks beras dengan parameter uji meliputi kadar air, butir patah, butir kepala, kadar amilosa dan derajat sosoh.



Gambar 7. Sertifikat akreditasi Lab.BBPM Pascapanen

Jumlah sampel yang diterima oleh BBPM Pascapanen periode Januari – Desember 2025 sebanyak 944 sampel dengan persentase pelanggan sebanyak 18,78% berasal dari swasta, 26,65% dari instansi pemerintah dan 54,49% dari mahasiswa/umum. Jumlah LHU yang diterbitkan periode Januari – Desember 2025 sebanyak 238 LHU (mencapai 116,1%) melebihi target. Jumlah pemasukan PNPB Laboratorium Penguji BBPM Pascapanen dari Bulan Januari – Desember 2025 mencapai Rp 287.337.500. BBPM Pascapanen juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa laboratorium pengujian, dengan nilai IKM yang diperoleh adalah 88,38 pada Semester I (Sangat Baik) dan 88,64 pada Semester II (Sangat Baik).

Re-akreditasi Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 30 Juni – 1 Juli 2025. Berdasarkan hasil asesmen, LP-366-IDN ditemukan 13 temuan ketidaksesuaian kategori 2 dan 4 observasi. Verifikasi tindakan perbaikan Re-akreditasi Laboratorium Pengujian telah diterima oleh KAN, dan dinyatakan *closed*. Sertifikat akreditasi laboratorium penguji telah diperpanjang berlaku dari 23 November 2025 sampai 23 November 2030.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium telah dilaksanakan melalui pelatihan personel PUP yang diselenggarakan oleh BSN, pelatihan GCMS, dan pelatihan yang diadakan BBPM Pascapanen meliputi pelatihan metode statistik, CPPOB, Penyusunan skema sertifikasi, dan petunjuk pengambilan contoh bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC).

4.2.4. Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia

Data komposisi pangan merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting untuk menyusun menu dan menilai kecukupan asupan konsumsi pangan individu dan kelompok dalam satu wilayah maupun negara. Data komposisi pangan yang lengkap diperlukan masyarakat sebagai sumber informasi dalam memilih dan mengkombinasikan pangan sehat menurut kandungan gizinya. Indonesia telah memiliki data komposisi pangan yang disusun dalam Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), saat ini masih memiliki kekurangan, yaitu masih cukup banyak bahan makanan yang memiliki nilai zat gizi tidak lengkap (*missing*) dan jumlah item bahan makanan dalam TKPI belum cukup mewakili bahan makanan yang banyak dan sering dikonsumsi di Indonesia. Oleh karena itu, data komposisi pangan di Indonesia saat ini masih terus dikembangkan. Manfaat TKPI dalam perencanaan pangan nasional dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, kualitas pangan, dan digunakan praktisi gizi di pelayanan kesehatan dalam memberikan konseling gizi kepada klien, atau digunakan langsung oleh rumah tangga dan masyarakat.

Kegiatan *Quality Improvement of Asian Food Composition Database* pada tahun 2025 merupakan kegiatan lanjutan dari proyek multi-years AFACI yang dilaksanakan selama periode September 2024 – Agustus 2027. Pada tahun anggaran 2025 (Januari–Desember), pelaksanaan kegiatan mencakup penyelesaian target tahun pertama AFACI (Januari – Agustus 2025) sekaligus percepatan pelaksanaan awal target tahun kedua (September 2025 – Desember 2025).

Target tahun pertama AFACI adalah menghasilkan data komposisi pangan dari 20 komoditas serta informasi mengenai 10 pangan tradisional. Dari target tersebut, 7 komoditas telah dilakukan persiapan sampel dan analisa pada akhir tahun 2024. Namun hasil analisisnya baru tersedia di tahun 2025 sehingga dicatat sebagai capaian tahun 2025.

Seiring dengan hal ini, kegiatan tahun kedua AFACI mulai dilaksanakan sejak September 2025 dengan pengambilan sampel dan analisis untuk 30 komoditas dengan target capaian output tahun kedua 50 komoditas (Tabel 6). Dengan demikian, capaian tahun anggaran 2025 adalah tersusunnya 50 data komposisi pangan (gabungan 20 komoditas target tahun pertama dan 30 komoditas awal tahun kedua) serta database informasi 10 pangan tradisional.

Pendekatan yang digunakan untuk kegiatan tahun 2025 adalah melanjutkan kegiatan berdasarkan pada hasil baseline survey yang dilakukan di tahun 2024, yaitu melanjutkan pengambilan sampel, preparasi dan analisis laboratorium, penyusunan basis data komposisi pangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui partisipasi dalam pelatihan dan workshop internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan standar FAO/INFOODS.

Tabel 6. Rekapitulasi komoditas, lokasi, dan waktu pengambilan sampel

No.	Komoditas	Lokasi	Waktu Pengambilan Sampel
CAPAIAN TAHUN PERTAMA AFACI (September 2024 - Agustus 2025)			
1	Tempoyak (pasta durian fermentasi)	Pasar, Kota Jambi, Jambi	16-12-2024
2	Dage (Oncom), fermentasi, mentah	Pasar, Kota Cirebon, Jawa Barat	16-12-2024
3	Kacang tolo, utuh, kering	Pasar, Kota Yogyakarta, DIY	18-12-2024
4	Daging sapi, brisket, semua kelas, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	18-12-2024
5	Keluak, pasta, tanpa cangkang, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	20-12-2024
6	Moncong sapi (cingur), direbus	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	23-12-2024
7	Petis udang (dengan campuran tepung)	Pasar, Kota Malang, Jawa Timur	24-12-2024
8	Petis ikan, fermentasi	Pasar, Kota Malang, Jawa Timur	24-12-2024
9	Daging kerbau, semua kelas, mentah	Pasar, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	13-01-2025
10	Daging ayam, semua bagian, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	14-01-2025
11	Sambal kacang, matang	Pasar, Kota Madiun, Jawa Tengah	17-01-2025
12	Kacang tanah, digoreng	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	17-01-2025
13	Tepung beras, utuh, giling	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	22-01-2025
14	Tepung ketan, utuh, giling	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	22-01-2025
15	Blondo (hasil samping santan dimasak), matang	Kota Yogyakarta, DIY	23-01-2025
16	Lontong (nasi padat), matang	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	18-02-2025
17	Pisang klutuk, muda, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	19-02-2025
18	Serai, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	19-02-2025
19	Kencur, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	19-02-2025
20	Nangka muda, kupas, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	20-02-2025
21	Daun jeruk, mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	20-02-2025
CAPAIAN TAHUN KEDUA AFACI (September 2025 - Agustus 2026)			
22	Gula Kelapa	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	10-09-2025
23	Gula Aren	Pasar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	22-09-2025
24	Gula Kristal Putih	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	10-11-2025
25	Tahu Putih, Mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	09-09-2025
26	Tahu Putih, Goreng	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	09-09-2025
27	Tempe, Mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	10-09-2025
28	Tempe, Goreng	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	10-09-2025

No.	Komoditas	Lokasi	Waktu Pengambilan Sampel
29	Kacang Tolo, Kulit Putih, Mentah	Pasar, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	13-10-2025
30	Kacang Tolo, Kulit Putih, Rebus	Pasar, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	13-10-2025
31	Kacang Tolo, Kulit Coklat, Rebus	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	21-10-2025
32	Kacang Tanah, Kupas, Mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	13-10-2025
33	Kacang Tanah, Kupas, Sangrai	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	13-10-2025
34	Kacang Tanah, Kupas, Goreng	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	13-10-2025
35	Kacang Tanah, Dengan Kulit, Mentah	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	30-12-2025
36	Kacang Tanah, Dengan Kulit, Sangrai	Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat	30-10-2025
37	Daun Pepaya, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	24-09-2025
38	Daun Pepaya, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	24-09-2025
39	Kangkung, Daun dan Batang, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	24-09-2025
40	Kangkung, Daun dan Batang, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	24-09-2025
41	Daun Singkong, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	25-09-2025
42	Daun Singkong, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	25-09-2025
43	Bayam, Daun, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	25-09-2025
44	Bayam, Daun, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
45	Timun	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
46	Kubis, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
47	Kubis, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
48	Kacang Panjang, Mentah	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
49	Kacang Panjang, Rebus	Pasar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	26-09-2025
50	Dage, Tumis	Pasar, Kota Cirebon, Jawa Barat	21-10-2025
51	Dage, Tumis dan Rebus	Pasar, Kota Cirebon, Jawa Barat	21-10-2025

Berdasarkan surat dari Executive Secretary, AFACI Secretariat Nomor AFACI 25-11 tanggal 29 Desember 2025 tentang *Congratulatory Letter for the 2025 Most Outstanding and Outstanding Country Winners*, Dr. Winda Haliza selaku penanggung jawab kegiatan di BBPM Pascapanen terpilih sebagai “*The 2025 Most Outstanding Country Winners*” untuk project AFCD (Gambar 8). Predikat “*Most Outstanding Country Winners*” adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada negara anggota atas keberhasilan luar biasa dalam mengimplementasikan proyek kerjasama pertanian. Penghargaan berupa plakat/sertifikat baru akan diserahkan di tahun 2026.



Gambar 8. Penghargaan *Most Outstanding Country Winners AFACI 2025*

V. DUKUNGAN MANAJEMEN

5.1. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian TA 2025 ini dilakukan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor. 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, Kepala BBPM Pascapanen Pertanian mendapat tugas sebagai penanggung jawab lapangan program LTT integrasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk optimasi lahan sebanyak 19.836 Ha, penyiapan brigade pangan sebanyak 99 orang, pertambahan areal tanam padi reguler sebanyak 367.911 Ha dan padi gogo sebanyak 988 Ha pada tahun 2025, melalui kegiatan: (1) Pendampingan kegiatan optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawab masing-masing; (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi; dan (3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi secara rutin kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dengan aplikasi yang tersedia sesuai program strategis Kementerian Pertanian yang menargetkan Swasembada Pangan, khususnya padi pada tahun 2025 untuk keberlanjutannya (Tabel 7).

Penyusunan rencana kegiatan optimasi lahan dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi dimulai dengan melakukan identifikasi terkait potensi perluasan areal tanam di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut identifikasi

target Perluasan Areal Tanam yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK awal hingga terbaru. Kabupaten Banyuasin sendiri memiliki total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 189.345,4 ha, dengan 30.951,36 ha LBS kondisi tidak aktif.

Tabel 7. Target optimasi lahan dan penambahan areal tanam untuk swasembada pangan di BBPM Pascapanen sesuai SK Tahun 2025

NO	TARGET PADA SK	KABUPATEN BANYUASIN		
		SK NOMOR 109/Kpts./PW.020/ M/03/2025	SK NOMOR 458/Kpts./PW.020/ M/06/2025	SK NOMOR 808/Kpts./KP.250/ A/09/2025
1	Optimasi Lahan (Ha)	-	19.836	19.836
2	Brigade Pangan (orang)	-	99	99
3	LTT Regular (Ha)	-	367.911	367.911
4	Padi Gogo (Ha)	-	988	988

Kegiatan pendampingan ini dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Ditjen PSP, Ditjen Tanaman Pangan dan Eselon 1 lainnya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Perencanaan kegiatan ini disusun sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan, target, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memantau progres pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan di lapangan, serta menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil monitoring diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan, perbaikan pelaksanaan program, serta peningkatan akuntabilitas dan kinerja pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan lapang dimulai dengan melakukan koordinasi awal BRMP Sumatera Selatan selaku PJ Provinsi Sumatera Selatan. Dalam koordinasi tersebut disampaikan kondisi lahan Kabupaten Banyuasin 70% lahan pasang surut dan 30% lahan lebak. Lahan lebak ini kurang dapat direalisasikan pertanamannya, karena kendala cuaca. Ketika musim hujan lahan tersebut akan terendam air, sehingga perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pertanaman.

Selanjutnya tim BBPM Pascapanen melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Banyuasin terkait kegiatan yang sudah berjalan di Kabupaten Banyuasin.

Dinas Kabupaten Banyuasin menyampaikan untuk kegiatan optimasi lahan 2024, Kabupaten Banyuasin mendapatkan kegiatan Optimasi Lahan seluas 11.700 ha. Luasan tersebut tersebar di 13 Kecamatan yaitu Banyuasin I, Banyuasin III, Muara Telang, Suak Tapeh, Muara Sugihan, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Tanjung Lago, Muara Padang, Sumber Marga Telang, Makarti Jaya, Rambutan, dan Sembawa. Luasan kegiatan optimasi lahan tahun 2025 masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Luasan Optimasi Lahan per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Banyuasin I	333
2	Banyuasin II	786
3	Rambutan	869
4	Makarti Jaya	532
5	Rantau Bayur	546
6	Muara Sugihan	7.414
7	Air Salek	1.077
8	Sembawa	212
9	Sumber Marga Telang	2.363
10	Karang Agung Ilir	5.615
11	Selat penuguan	3.791
Total		24.268

Realisasi anggaran kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan sampai dengan 12 Januari 2025 sebesar Rp804.076.451 (99,89% dari pagu efektif) dan capaian fisik sebesar 100%. Target Optimalisasi lahan pada SK Tahun 2025 untuk Kabupaten Banyuasin adalah 19.836 ha dan berdasarkan data per kecamatan pada Tabel diperoleh total luas lahan hasil optimasi mencapai 24.268 ha (tercapai 122,34% dari target). Tim Brigade Pangan yang terbentuk dari target 99 tercapai 117 (118,18% dari target). Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler Kabupaten Banyuasin sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai sekitar 267.015 ha (72%) dari target 367.911 ha (Tabel 9). LTT Padi Gogo dari target 988 ha hanya tercapai 37 ha (Tabel 10). Seluruh target tanam pada Bulan Desember 2025 telah tercapai khususnya terkait optimalisasi lahan. Meskipun demikian, masih ada yang belum tercapai target,

hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala di lapangan, seperti: saluran primer dan sekunder yang mengalami pendangkalan yang menyebabkan banjir, keterbatasan alsintan, serta mundurnya jadwal tanam akibat kondisi cuaca.

Capaian kegiatan optimasi lahan 2024 seluas 23.779 ha dengan indeks pertanian 2,03, meskipun telah terjadi peningkatan IP di beberapa Kecamatan, namun kecamatan lain perlu ditingkatkan kembali, mengingat target yang di tetapkan yaitu minimal IP 2,5. Untuk kegiatan Optimasi Lahan 2025, beberapa Kecamatan masih dalam kondisi konstruksi pengerjaan sehingga pertanian belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu bantuan alsintan juga belum tersedia, sehingga pengolahan lahan menjadi terhambat.

Tabel 9. Capaian Pertanian MT I – IV di Kabupaten Banyuasin

NO	MASA PERTANAMAN	Capaian Pertanian (Ha)				
		Reguler	Opla 24	Opla 25	Padi Gogo	Total Pertanian
1	MT I	129.627	9.631	-	20	139.278
2	MT II	73.102	7.042,5	-	-	80.144,5
3	MT III	34.443	7.105,5	6.027	17	46.294,5
TOTAL		237.172	23.779	6.027	37	267.015

Tabel 10. Target dan realisasi optimasi lahan dan penambahan areal tanam untuk swasembada pangan di BBPM Pascapanen sesuai SK Tahun 2025

NO	URAIAN TARGET PADA SK NOMOR 808/Kpts./KP.250/A /09/2025	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Optimasi Lahan (Ha)	19.836	24.268	122,34
2	Brigade Pangan (Tim)	99	117	118,18
3	LTT Regular (Ha)	367.911	237.172	72,58
4	Padi Gogo (Ha)	988	37	3,74

5.2. Pelaksanaan Pengelolaan BMN

Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha meliputi urusan tata kelola surat menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas, pelayanan

komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor. Selama tahun 2025 telah dilakukan inventarisasi terhadap aset, pengembangan aplikasi siaset, penghapusan aset (kendaraan roda 4) dan hibah aset RMU di Banyuasin yang masih dalam proses.

5.3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Kegiatan penyebarluasan informasi dilakukan secara berkelanjutan selama periode satu tahun. Informasi yang disampaikan adalah tentang kebijakan, program, kegiatan dan layanan yang ada di BBPM Pascapanen dengan keterbukaan informasi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penyebarluasan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat telah dilaksanakan melalui:

1. Penyebarluasan hasil standardisasi dan hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian melalui sosialisasi, webinar, website, media sosial (FB, IG, Twitter), youtube, brosur/leaflet, poster, media elektronik, media cetak;
2. Penyebarluasan informasi publik melalui layanan konsultasi, kunjungan/studi banding, dan magang/PKL;

Responden untuk layanan konsultasi sebanyak 94 responden, sebagian besar berusia antara 41 – 50 tahun, dan >50 tahun, selanjutnya berumur 31 – 40 tahun. Hal ini sejalan dengan pendidikan koresponden dan pekerjaannya, dimana Petani (Lainnya) paling banyak menjadi koresponden diikuti oleh pegawai swasta dan wirausaha. Adapun profil responden terdiri dari: 42 orang memiliki pendidikan SLTA, 22 orang memiliki Pendidikan SD, 14 orang SLTP selanjutnya 13 orang S1 dan 2 orang S2 dan S3, dengan jenis kelamin perempuan sebesar 50%, dan

50% laki-laki. Jumlah pengguna layanan konsultasi dapat dilihat pada Tabel 11.

BBPM Pascapanen menerima kunjungan/studi banding mulai dari pelajar, mahasiswa, swasta, lembaga pemerintahan dan asosiasi baik dari dalam dan luar negeri. Agenda yang umumnya dilaksanakan pada kegiatan kunjungan adalah penyampaian profil BBPM Pascapanen Pertanian, penyampaian maksud dan tujuan oleh perwakilan peserta kunjungan, diskusi serta dilanjutkan dengan kunjungan ke laboratorium-laboratorium yang ada di BBPM Pascapanen. Daftar penerimaan kunjungan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Layanan konsultasi dalam kurun waktu Januari-Desember 2025

No	Bulan	Saluran Permohonan	Jumlah
1	Januari	- Konter Layanan - Email	7 -
2	Februari	- Konter Layanan - Email	4 4
3	Maret	- Konter Layanan - Email	6 1
4	April	- Konter Layanan - Email	12 5
5	Mei	- Konter Layanan - Email	12 5
6	Juni	- Konter Layanan - Email	6 -
7	Juli	- Konter Layanan - Email	6 -
8	Agustus	- Konter Layanan - Email	6 -
9	September	- Konter Layanan - Email	6 -
10	Oktober	- Konter Layanan - Email	3 -
11	November	- Konter Layanan - Email	2 4
12	Desember	- Konter Layanan - Email	- -

Tabel 12. Daftar kunjungan selama Tahun 2025

No	Waktu (bulan)	Asal instansi peserta kunjungan
1	Juli	- Mahasiswa Program D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Politeknik Negeri Subang.
2	November	- SMP Bosowa Bina Insani
3	Desember	- UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Bapeltan) Provinsi Jawa Barat - Don Mariano Marcos <i>Memorial State University</i> (DMMMSU) Filipina, bersama dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Salah satu layanan di BBPM Pascapanen yang paling banyak peminatnya adalah Magang atau PKL. Sampai bulan Desember 2025, BBPM Pascapanen sudah menerima sekitar 41 peserta magang/PKL yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Tabel 13).

Tabel 13. Peserta magang/PKL Tahun 2025

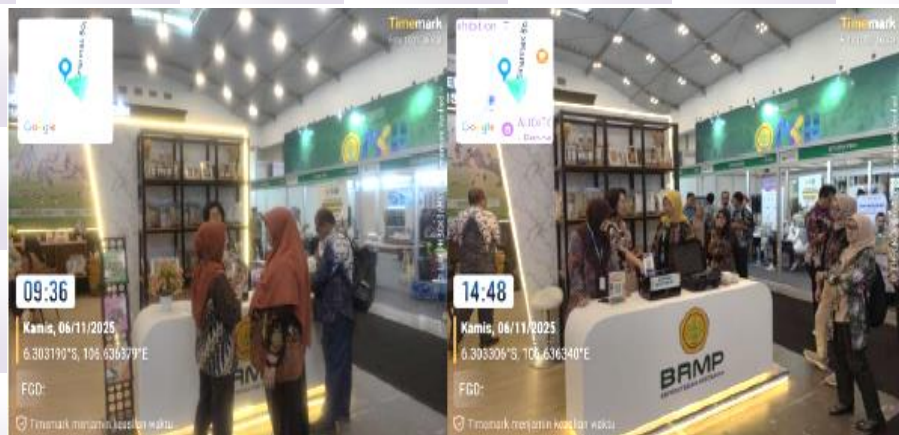
No	Asal Sekolah/Perguruan Tinggi/Institusi	Lama waktu (bulan)	Jumlah (orang)
1	Universitas Jenderal Soedirman	1	2
2	Universitas Diponegoro	1	5
3	SJMP IPB	6	2
4	Universitas Lampung	2	2
5	Vokasi IPB	6	3
6	Universitas Pendidikan Indonesia	4	2
7	IPB University	4	12
8	ITB	1	1
9	Universitas Pasundan	1	1
10	IPB University	3	2
11	Kemenaker	7	3
12	SMKN Pertanian Karawang	5	5
13	Universitas Singaperbangsa Karawang	1	1
TOTAL			41

3. Penyebarluasan informasi melalui pameran

- Pameran Indogritech 2025

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian turut berpartisipasi dalam Pameran INDOGRITECH 2025 yang berlangsung

pada tanggal 6-9 November 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan (Gambar 9). Acara ini selain menjadi ajang pameran dagang dan inovasi pertanian yang mempertemukan Kementerian Pertanian, dunia usaha, lembaga riset, akademisi, serta pelaku industri pertanian juga sebagai wadah kolaborasi untuk menghadirkan solusi konkret bagi pembangunan sektor pertanian nasional yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pameran INDOGRITECH 2025 resmi dibuka pada 6 November 2025 oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudarsono. Dalam kegiatan ini, BBPM Pascapanen turut serta dalam pameran yang dihimpun dan ditampilkan dalam booth BRMP. Melalui partisipasi ini, Pascapanen memperlihatkan beragam inovasi dan layanan unggulan yang menggambarkan komitmen lembaga dalam mendukung modernisasi pertanian nasional, antara lain Kit Deteksi Aflatoksin, Biobriket, Biosilika, nasi instan, dan sertifikasi halal.



Gambar 9. Pameran Indogritech 2025

- Pameran Agrifest 2025

BBPM Pascapanen ikut meramaikan kegiatan BRMP Agrifest 2025 pada 11-13 November 2025 di Auditorium Sadikin Sumintawikarta,

Cimanggu Bogor (Gambar 10). BRMP Agrifest digelar dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). BRMP Agrifest 2025 menjadi ajang yang meriah dan inspiratif, menampilkan berbagai kegiatan yang terdiri dari panen pertanian modern, pameran teknologi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), vaksinasi rabies gratis, pembagian benih tanaman dan DOC ayam KUB gratis, bazar pangan murah, lomba mewarnai, jalan sehat.

Pada kesempatan ini, BBPM Pascapanen turut secara aktif pada pameran yang menampilkan produk-produk hasil inovasi dan teknologi pascapanen yang terdiri dari kit deteksi aflatoksin, biobriket dan biosilika sekam padi, biofoam jerami, kemasan ramah lingkungan, gula cair jagung, gula cair sorgum, brown sugar dan gula sorgum, berasan sorgum, olahan kelapa, olahan jagung, tepung telur, gelatin ceker ayam, nasi kuning instan, olahan beras fortifikasi. BBPM Pascapanen juga berkesempatan memperkenalkan produk inovasi dan teknologi pascapanen kepada Walikota Bogor, Dedie A. Rachim yang didampingi langsung oleh Kepala BRMP.



Gambar 10. Pameran Agrifest 2025

- Pameran HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Nelayan Indonesia)

BBPM Pascapanen turut berpartisipasi pada kegiatan Temu Tani Nasional dan Rakernas Himpunan Kerukunan Tani Nelayan Indonesia 2025 yang dilaksanakan pada Rabu 3 Desember 2025 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi (Gambar 11). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah, pelaku usaha dan petani untuk memperkuat kembali pondasi pangan nasional.

Pada kesempatan ini, BBPM Pascapanen Pertanian turut berpartisipasi pada pameran yang menampilkan produk-produk hasil inovasi dan teknologi pascapanen yang terdiri dari kit deteksi aflatoksin, biobriket sekam padi, biosilika cair sekam padi, biofoam jerami. BBPM Pascapanen Pertanian juga berkesempatan memperkenalkan produk inovasi dan teknologi pascapanen tersebut kepada Wakil Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN HKTI, Dr.H. Sudaryono.



Gambar 11. Pameran HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Nelayan Indonesia)

4. Penyebarluasan melalui FGD

- *Focus Group Discussion* (FGD) Regulasi Perberasan Nasional

Dalam rangka memperkuat sistem perberasan nasional yang berdaya saing, berkeadilan, dan melindungi konsumen, Badan Perakitan dan

Modernisasi Pertanian (BRMP) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar: Sinkronisasi Kebijakan, Penguatan Mutu, Peran Produsen, dan Perlindungan Konsumen”. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika pasar perberasan yang semakin kompleks. Kegiatan FGD dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di aula It.4 BRMP, Jakarta dengan jumlah peserta 238 orang (80 orang hadir secara offline dan sebanyak 158 orang hadir online) yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (Gambar 12).

Kegiatan dibuka secara resmi melalui sambutan Kepala BRMP, Fadjry Djufry, yang disampaikan oleh Sekretaris BRMP, Husnain. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa beras tidak hanya berperan sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi indikator penting stabilitas ekonomi dan sosial nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan serta penguatan mutu beras guna menjamin keberlanjutan sistem perberasan nasional.

Dalam arahannya, Kepala BRMP menekankan bahwa dinamika pasar perberasan menghadirkan berbagai tantangan, antara lain fluktuasi harga, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta isu mutu beras yang berdampak langsung terhadap kepercayaan dan perlindungan konsumen. Ditegaskan pula bahwa mutu beras merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen, di mana masyarakat berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, berkualitas, dan terjangkau.

Sebagai langkah konkret, BRMP melalui Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian telah mengembangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealisa serta Lembaga

Sertifikasi Produk (LSPro) Beras. Namun demikian, upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menerapkan regulasi perberasan nasional yang selaras, adaptif terhadap tantangan pasar, serta berpihak pada peningkatan mutu dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini menjadi langkah strategis BRMP dalam mendukung terwujudnya sistem perberasan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan.



Gambar 12. Pelaksanaan FGD Beras

5. Pelaksanaan pelatihan pelayanan informasi dan pelayanan prima

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas petugas layanan publik agar mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan public, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Prima pada 5 Desember 2025 (Gambar 13). Pelatihan Pelayanan Prima dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dari BBPM Pascapanen untuk mendukung program Kementerian Pertanian dalam menyediakan pelayanan dan keterbukaan publik yang transparan kepada masyarakat dengan pelayanan yang sebaik – baiknya (prima).

Kegiatan pelatihan bertema “Optimalisasi Standar Pelayanan untuk Memberikan Layanan Prima di BRMP Pascapanen” diadakan untuk memperkuat pemahaman pegawai terhadap prinsip keterbukaan informasi dan standar pelayanan publik yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari IBM ASMI Jakarta, Asmulyanti, yang memaparkan materi inti mengenai implementasi pelayanan prima di lingkungan kerja. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural, ketua kelompok, ketua tim kerja, seluruh petugas layanan, satpam, serta pegawai BBPM Pascapanen baik di Bogor maupun Karawang. Dengan terselenggaranya pelatihan ini, BBPM Pascapanen berharap seluruh pegawai mampu menerapkan standar pelayanan publik yang lebih optimal dan memberikan pengalaman layanan terbaik bagi masyarakat.



Gambar 13. Pelatihan pelayanan prima di BBPM Pascapanen

6. Pelaksanaan Evaluasi Layanan Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian - selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. BBPM Pascapanen telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan, Laporan Kegiatan yang didalamnya terdapat hasil evaluasi kuesioner peserta. Hasil Survei ini perlu dievaluasi untuk mendapatkan kendala dan solusi dari penilaian pelanggan. Responden adalah pelanggan layanan BBPM Pascapanen selama bulan Januari sampai Desember 2025 yang di analisa setiap 4 Triwulan. Triwulan I (Periode Januari – Maret) 2025 dengan jumlah koresponden berjumlah 109 responden, Triwulan II (Periode April - Juni) 2025 dengan jumlah koresponden berjumlah 133 responden, triwulan III (periode Juli – September) 2025 dengan 92 responden dan Triwulan IV (periode Oktober – Desember) 2025 dengan 66 responden dengan nilai kepuasan bervariasi (Tabel 14). Perbedaan hasil survey kepuasan masyarakat pada Triwulan I – IV dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14. Nilai Kepuasan Masyarakat Triwulan I – IV Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat Rata-rata			
		TW1	TW2	TW3	TW4
U1	Persyaratan pelayanan	3,468	3,504	3,424	3,500
U2	Prosedur Pelayanan	3,468	3,496	3,440	3,479
U3	Waktu Pelayanan	3,413	3,459	3,370	3,484
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,899	3,857	3,783	3,957

No	Unsur Pelayanan	Nilai Kepuasan Masyarakat Rata-rata			
		TW1	TW2	TW3	TW4
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,468	3,466	3,424	3,479
U6	Kompetensi Pelaksana	3,495	3,511	3,457	3,585
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,495	3,481	3,457	3,596
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,991	3,925	3,946	4,000
U9	Sarana dan Prasarana	3,477	3,489	3,359	3,447

Tabel 15. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Triwulan I – IV Tahun 2025

No	Uraian	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025	Triwulan III 2025	Triwulan IV 2025
1	Nilai Indeks unit pelayanan	3,571	3,573	3,514	3,540
2	Nilai IKM setelah dikonevsi	89,284	89,322	87,848	88,50
3	Mutu pelayanan	A	A	B	A
4	Kinerja unit pelayanan	Sangat baik	Sangat baik	Baik	Sangat baik

Untuk evaluasi peningkatan kualitas publik BBPM Pascapanen melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat Google Form. Pelaksanaan survei ini digabung dan direkap setiap 3 bulan sekali selama satu tahun sehingga terdapat 4 triwulan dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Nilai survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) masyarakat pada setiap unsur pada Triwulan I - IV Tahun 2025

Unsur	Nilai rata rata skala 4			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
U1	3,51	3,51	3,50	3,52
U2	3,55	3,55	3,67	3,59
U3	3,42	3,42	3,67	3,55
U4	3,46	3,46	3,33	3,48
U5	3,46	3,46	3,50	3,48

U6	3,42	3,42	3,33	3,65
U7	3,46	3,46	3,50	3,65
U8	3,42	3,42	3,83	3,56
Indeks SPKP	3,46	3,46	3,54	3,56

Tabel 17. Nilai survei persepsi anti korupsi (SPAK) pada setiap unsur pada Triwulan I - IV Tahun 2025

Unsur	Nilai rata rata skala 4			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
U1	3,60	3,64	3,83	3,655
U2	3,55	3,57	3,83	3,55
U3	3,60	3,61	3,83	3,55
U4	3,64	3,68	3,83	3,55
U5	3,55	3,67	3,83	3,68
Indeks SPAK	3,59	3,64	3,83	3,58

Penilaian KIP tahun 2025 ini, BBPM Pascapanen kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Capaian ini menjadi bukti konsistensi BBPM Pascapanen dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pertanian bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, pada 22 Desember 2025, dan diterima langsung oleh Kepala BRMP Pascapanen (Gambar 14).



Gambar 14. Sertifikat keterbukaan informasi publik

5.4 Pelaksanaan Monev, SPI, Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, BBPM Pascapanen melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta reformasi birokrasi. Tim evaluasi melakukan pelaporan meliputi penyusunan LAKIN, Laporan Kegiatan Bulanan BBPM Pascapanen Pertanian, penyusunan Laporan Tahunan BBPM Pascapanen Pertanian, penyusunan laporan Tim Kerja evaluasi, *Up-Dating* Data Kemajuan Kegiatan Bulanan dan Triwulanan secara online pada aplikasi (i-monev BSIP, e-monev Bappenas, e-sakip, monev SMART-Kemenkeu PMK 214/2023).

5.4.1. Sosialisasi SPI lingkup BBPM Pascapanen

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran seluruh pegawai BBPM Pascapanen tentang bagaimana pengendalian internal sehingga tujuan kegiatan balai dapat terlaksanakan secara efektif, efisien dan transparan. SPI merupakan unsur yang diperlukan dalam reformasi birokrasi terutama dalam unsur pengawasan di setiap aspek termasuk juga bagaimana penggunaan aset negara serta ketaatan

terhadap peraturan perundang undangan. Sosialisasi SPI merupakan agenda tahunan karena pengendalian SPI dilakukan terus menerus dalam organisasi untuk membentuk budaya kerja yang sesuai.

UPG (Unit Pengelolaan Gratifikasi) merupakan bagian dari SPI. Gratifikasi diatur di dalam UPG, ada gratifikasi yang tidak boleh dan ada yang boleh. Gratifikasi yang tidak boleh yang bersifat kedinasan, yang diperbolehkan bersifat asenda. Supaya pemberian tidak menjadi gratifikasi maka harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, jangan dibawa pulang, dibersifat umumkan. Gratifikasi dalam kedinasan adalah honorarium, hadiah, tidak boleh melebihi pagu dan sesuai SBM. Salah satu bentuk pengendalian gratifikasi adalah narasumber tidak boleh menerima honorarium dari K/L yang sama, termasuk juga biaya perjalanan. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh pegawai lingkup BBPM Pascapanen Pertanian.

Salah satu kelemahan dalam penilaian SPI adalah penilaian manajemen risiko, Sub penilaian risiko saat ini menunjukkan nilai paling kecil diantara unsur SPI lainnya masih kurangnya penerapan manajemen risiko. Pada perpres 12 tahun 2020 secara tegas menyebutkan bahwa MRI harus ada di level 3 sebagai indikator capaian di setiap K/L, dengan adanya pengawalan dan pendampingan diharapkan para penjab kegiatan mengetahui titik kritis dari probis kegiatannya agar output tetap tercapai, berharap seluruh pegawai mengetahui bagaimana mengelola risiko dan mengantisipasi serta memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Selama tahun 2025 Sub Unit Pengelola Gratifikasi BBPM Pascapanen telah menyusun laporan UPG sebanyak dua belas laporan (bulan Januari s.d Desember 2025). Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan UPG di BBPM Pascapanen periode Januari s.d Desember tahun 2025 tidak terdapat laporan gratifikasi dari pejabat struktural/fungsional/pegawai BBPM Pascapanen (Tabel 18).

Rendahnya laporan gratifikasi di tahun 2025 dikarenakan adanya transformasi organisasi dimana para peneliti telah beralih ke BRIN, umumnya pelaporan gratifikasi disampaikan oleh peneliti saat menjadi narasumber, selain

itu kesadaran pegawai untuk melaporkan terkait gratifikasi masih rendah, kekurangpahaman pegawai terhadap bentuk dan jenis gratifikasi, upaya untuk meningkatkan pelaporan gratifikasi telah dilakukan dengan cara mengingatkan baik melalui wa grup maupun surat resmi kepada pegawai agar dapat melaporkan terkait gratifikasi melalui Surat Edaran Gratifikasi bulanan.

Tabel 18.Laporan Gratifikasi Tahun 2025

No.	Jenis/Bentuk Gratifikasi	Nama Penerima Gratifikasi	Tanggal Penerimaan Pemberian	Hubungan dengan Pemberi Gratifikasi
1.	NIHIL	--	JANUARI	--
2.	NIHIL	--	FEBRUARI	--
3.	NIHIL	--	MARET	--
4.	NIHIL	--	APRIL	--
5.	NIHIL	--	MEI	--
6.	NIHIL	--	JUNI	--
7.	NIHIL	--	JULI	--
8.	NIHIL	--	AGUSTUS	--
9.	NIHIL	--	SEPTEMBER	--
10.	NIHIL	--	OKTOBER	--
11.	NIHIL	--	NOVEMBER	--
12.	NIHIL	--	DESEMBER	--

Selain melakukan pengendalian gratifikasi dilakukan juga dengan unit pengaduan Masyarakat. Selama tahun 2025, UPP-Dumas BBPM Pascapanen telah menyusun laporan sebanyak dua belas laporan dari bulan Januari hingga Desember 2025 (Tabel 19). Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan Dumas di BBPM Pascapanen periode Januari s.d Desember tahun 2025, terdapat pengaduan terkait pelayanan publik teknis maupun administratif sebanyak 2 aduan terkait layanan pengujian di laboratorium, yaitu pada bulan Mei dan Agustus, kedua laporan itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian ulang, sesuai dengan surat Nomor: B-1034/OT.080/11.9/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan memberikan tanggapan melalui surat Nomor: B-1929/OT.080/11.9/09/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Penyelesaian Pengaduan Hasil Analisa Laboratorium Pengujian BRMP Pascapanen. Laporan

pengaduan pelayanan di BBPM Pascapanen dapat dilakukan melalui website, telepon dan SMS, maupun kotak saran.

Tabel 19. Rekapitulasi pengaduan masyarakat Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Pengadu	Nama/Jenis/Uraian Pengaduan	Hasil Penyelesaian Pengaduan
1.	Januari	--	Nihil	--
2.	Februari	--	Nihil	--
3.	Maret	--	Nihil	--
4.	April	--	Nihil	--
5.	Mei	Siti Fathima Aleyda Putri	Keluhan pengaduan terhadap data hasil uji, terdapat perbedaan hasil uji untuk sampel kode 11 yang berbeda dengan 3 sampel lainnya	Surat Nomor: B-1034/OT.080/11.9/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penyelesaian Pengaduan Hasil Analisa Laboratorium Pengujian BBPM Pascapanen Pertanian dengan melaksanakan pengujian ulang.
6.	Juni	--	Nihil	--
7.	Juli	--	Nihil	--
8.	Agustus	Wera Thalut Malika	Hasil Analisa kadar karohidrat dan kadar energi yang terlalu tinggi	Tanggapan melalui surat Nomor: B-1929/OT.080/11.9/09/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Penyelesaian Pengaduan Hasil Analisa Laboratorium Pengujian BRMP Pascapanen.
9.	September	--	Nihil	--
10.	Oktober	--	Nihil	--
11.	November	--	Nihil	--
12.	Desember	--	Nihil	--

VI. PERAKITAN, PEREKAYASAAN, DAN MODERNISASI PERTANIAN

6.1. Perakitan dan Perekayasaan Teknologi Pascapanen Pertanian

Kegiatan perakitan BBPM Pascapanen dilaksanakan melalui berbagai kegiatan unggulan dari proyek *Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment* (ICARE) melalui anggaran kemitraan dengan Bank Dunia yang diampu oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

BBPM Pascapanen telah menghasilkan beberapa perakitan teknologi sebagai berikut:

1) Teknologi Pengolahan Kentang untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Wilayah Sulawesi Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Malino, Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Keluaran kegiatan ini adalah:

- a) Teknologi pengolahan beserta dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Keripik Kentang, Produk Intermediate dan Siap Santap yang telah berhasil disusun dan divalidasi melalui uji penerapan (Gambar 15);
- b) Perakitan mesin pengupas, pengiris, dan pengering kentang dan berfungsi optimal sesuai spesifikasi teknis.

Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan sikap positif dari para petani/ pelaku usaha terhadap inovasi teknologi pengolahan kentang.



Gambar 15. SOP Pengolahan Kentang dan Penerapan Teknologi Pengolahan Kentang

2) Rekayasa Pengolahan Tepung Beras Fortifikasi untuk Percepatan Penanggulangan Stunting dan Penguatan UMKM di Jawa Tengah

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Keluaran kegiatan ini adalah:

- a) Lini produksi dan unit usaha tepung beras fortifikasi termasuk operasionalisasinya yaitu Rumah Produksi Tepung Beras "Teratai" berkapasitas 1 ton/bulan; di mana tepung beras yang dihasilkan dengan varietas Inpari Nutrizinc menunjukkan kandungan Zn yang signifikan hingga 2,07 mg/100g (Gambar 16).
- b) Bimbingan teknis pengolahan tepung beras biofortifikasi dan studi banding ke unit produksi sejenis yang lebih maju di Kecamatan Cigombong, kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk peningkatan kompetensi pelaku usaha tepung beras;

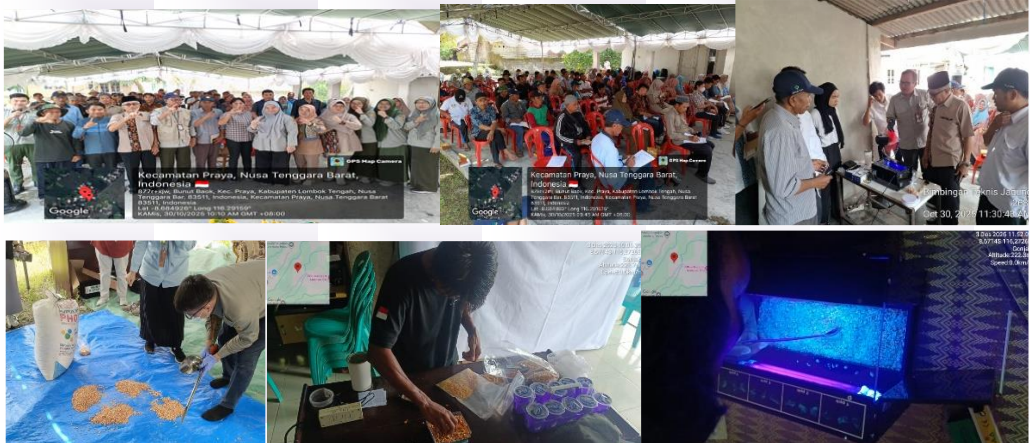


Gambar 16. Unit Produksi Tepung Beras dan Produk Tepung Beras “Teratai”

3) Teknologi Penanganan Pascapanen Jagung Untuk Menekan Cemaran Aflatoksin

Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keluaran kegiatan ini adalah:

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan pascapanen jagung yang sesuai dengan kondisi petani di lokasi kegiatan;
- Alat deteksi kapang penghasil aflatoksin serta replikasinya;
- Bimbingan teknis (Bimtek) SOP Penanganan pascapanen jagung kepada petani (Gambar 17);
- Penerapan teknologi pascapanen dan hasil uji mutu jagung pipil yang memenuhi standar SNI 8926.



Gambar 17. Bimbingan teknis (Bimtek) SOP Penanganan pascapanen jagung kepada petani

4) Teknologi Kemasan Cerdas untuk daging domba

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keluaran kegiatan ini adalah:

- Perakitan prototipe label indikator warna untuk kesegaran daging;
- Validasi prototipe melalui pengujian parameter kesegaran daging untuk keasaman (pH), pembusukan (TVBN), dan jumlah bakteri (TPC) menunjukkan korelasi yang sesuai dengan perubahan warna label;
- Sosialisasi praktik aplikasi label indikator warna untuk kesegaran daging kepada pelaku usaha di kecamatan Cisurupan, Sukaresmi, dan Pasirwangi, Kabupaten Garut (Gambar 18).



Gambar 18. Sosialisasi praktik aplikasi label indikator warna untuk kesegaran daging

6.2. Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee: *Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR)*

BBPM Pascapanen ditugaskan menjadi Koordinator Mirror Committee: *Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR)*. Output yang dihasilkan adalah posisi Indonesia *Conference Room Document (CRD)* Sidang CCPR 56 dari Indonesia. Capaian tersebut diperoleh melalui beberapa kegiatan yaitu: (i) Rapat Internal Persiapan Pembahasan CL, CRD, Agenda dan Matriks Sidang; (ii) Rapat Persiapan Sidang dan; (iii) Koordinasi dan Konsolidasi terkait Harmonisasi Standar. Kegiatan tersebut diatas melibatkan stakeholder dalam rapat tindak lanjut dan kolaborasi data seluruh mitra/stake holder diantaranya dengan BSN, Bapanas, Kemendag; lingkup Kementan: Ditjen Teknis (Perlindungan, Keswan, PSP), BRMP; Lab. Pestisida: PPMB, BPMPT, Balingtan; Swasta (Asosiasi *Cropcare* dan *Croplife*); dan Pakar (BRIN).

6.3. Penyusunan Pohon Industri Komoditas Pertanian Strategis

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi dalam perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian

memiliki peran penting khususnya dalam hilirisasi produk pertanian. Pada tanggal 10 Oktober 2025, BBPM Pascapanen menyelenggarakan penyusunan pohon industri komoditas strategis pertanian. Kegiatan tersebut menghasilkan pohon industri yang dapat dijadikan acuan dalam hilirisasi produk pertanian strategis di Indonesia. Pohon industri tersebut terdiri dari 29 komoditas strategis dari lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Gambar 19).



Gambar 19. Contoh Pohon Industri Komoditas Cabai Merah

6.4. Klinik Modernisasi Pertanian

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian melaksanakan kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) di tiga provinsi lokasi *Program Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment* (ICARE) yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Kegiatan ini didanai melalui anggaran kemitraan dengan Bank Dunia yang diampu oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Tujuan utama pelaksanaan KMP adalah mendekatkan inovasi dan teknologi pertanian kepada petani secara langsung. KMP menyediakan berbagai layanan, berupa sosialisasi dan diseminasi teknologi dan bimbingan teknis beberapa komoditas target pengembangan program ICARE (Gambar 20) yaitu: (1) kentang dan domba (Jawa Barat); (2) jagung dan mangga (Jawa Timur); (3) padi dan jeruk (Kalimantan Barat). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif bagi berbagai pihak untuk berinteraksi, berdiskusi, serta memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan.



Gambar 20. Bimbingan Teknis KMP Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur

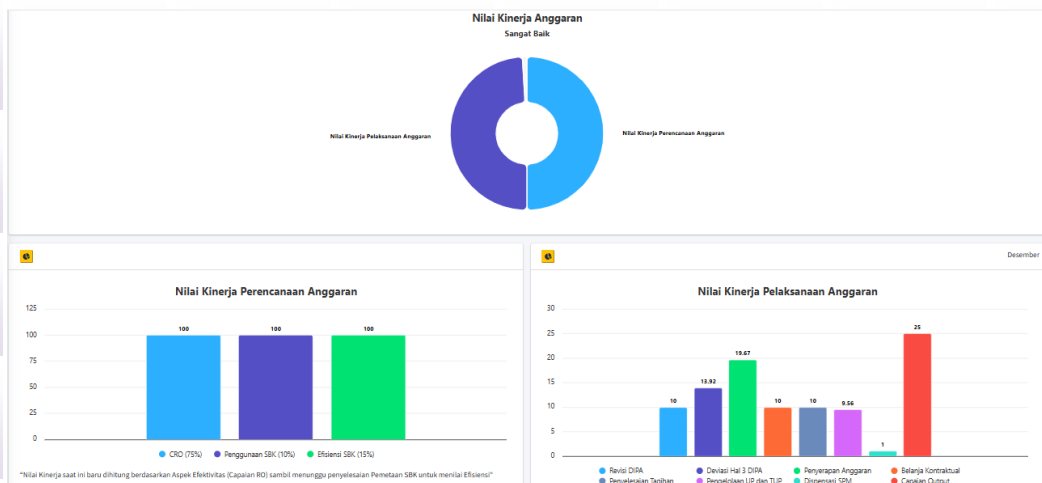
VII. KINERJA ANGGARAN

Pada Tabel 20 disajikan realisasi anggaran BBPM Pascapanen sampai tanggal 12 Januari 2026 yaitu sebesar Rp16.575.153.921,- (96,09% dari pagu total atau 98,05% dari pagu efektif).

Tabel 20. Realisasi anggaran BBPM Pascapanen

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Pagu efektif (Rp)	Realisasi s/d 12 Januari 2025		
			Rp	Pagu Total (%)	Pagu efektif (%)
Belanja pegawai	6.653.681.000,-	6.653.681.000,-	6.631.689.597,-	99,67	99,67
Belanja barang	10.595.798.000,-	10.251.898.000,-	9.943.464.324,-	93,84	96,99
Total	17.249.479.000,-	16.905.579.000,-	16.575.153.921	96,09	98,05

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas yang dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART-KEU DJA (Gambar 21).



Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran BBPM Pascapanen Tahun 2025 pada aplikasi MONEY SMART-KEU DJA

Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pascapanen adalah 97,14 (kategori Sangat Baik). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran meliputi: revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Sedangkan dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran meliputi: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output. Data tersebut dapat diperoleh dari aplikasi MONEV SMART KEU.

VIII. PENUTUP

BBPM Pascapanen telah menghasilkan beberapa output sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsinya terkait perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian pada tahun 2025, yang dikelompokkan menjadi: (a) Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, (b) Layanan Pengujian dan Sertifikasi, (c) Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, (d) Layanan Dukungan Manajemen Internal dan (e) Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Terkait layanan perumusan rancangan standar instrumen pascapanen pertanian, BBPM Pascapanen selama tahun 2025 BSIP/BBPM Pascapanen berkolaborasi dengan tim konseptor dan Komite Teknis 65-22 Pascapanen Pertaniandan telah berhasil merumuskan 3 RSNI3 yang telah ditetapkan sebagai SNI bidang pascapanen pertanian, yaitu: (1) Pedoman penanganan pascapanen lada putih (SNI 9422:2025); (2) Pedoman proses pascapanen jagung (*Zea mays* L.) menjadi beras jagung (SNI 9423:2025), dan (3) Pedoman proses pascapanen cabai (*Capsicum annuum* dan *Capsicum frutescens*) menjadi cabai kering (SNI 9424:2025).

Terkait layanan pengujian dan sertifikasi pada tahun 2025, terdapat 28 UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal di LPH BBPM Pascapanen. LPH BBPM Pascapanen telah menerbitkan 28 penetapan halal dan sebanyak 27 UMKM tersebut telah memperoleh sertifikat halal, dari target 8 sertifikat halal, sedangkan untuk layanan pengujian di laboratorium telah dihasilkan sebanyak 238 LHU dari target 200 produk LHU. Terkait pembentukan jejaring basis data komposisi pangan Asia, capaian tahun anggaran 2025 adalah tersusunnya 50 data komposisi pangan (gabungan 20 komoditas target tahun pertama dan 30 komoditas awal tahun kedua) serta database informasi 10 pangan tradisional, serta terpilihnya Penjab kegiatan AFACI Indonesia sebagai penerima Penghargaan *Most Outstanding Country Winners* AFACI 2025.

Terkait layanan koordinasi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait termasuk BRMP Sumatera Selatan selaku PJ Provinsi Sumatera Selatan. Dalam koordinasi tersebut disampaikan kondisi lahan Kabupaten Banyuasin 70% lahan pasang surut dan 30% lahan lebak. Lahan lebak ini kurang dapat direalisasikan pertanamannya, karena kendala cuaca. Selanjutnya tim BBPM Pascapanen melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Banyuasin terkait kegiatan yang sudah berjalan di Kabupaten Banyuasin. Dinas Kabupaten Banyuasin menyampaikan untuk kegiatan optimasi lahan 2024, Kabupaten Banyuasin mendapatkan kegiatan Optimasi Lahan seluas 11.700 ha. Luasan tersebut tersebar di 13 Kecamatan yaitu Banyuasin I, Banyuasin III, Muara Telang, Suak Tapeh, Muara Sugihan, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Tanjung Lago, Muara Padang, Sumber Marga Telang, Makarti Jaya, Rambutan, dan Sembawa. Target Optimalisasi lahan pada Tahun 2025 untuk Kabupaten Banyuasin adalah 19.836 ha dan berdasarkan data per kecamatan pada Tabel diperoleh total luas lahan hasil optimasi mencapai 24.268 ha (tercapai 122,34% dari target). Tim Brigade Pangan yang terbentuk dari target 99 tercapai 117 (118,18% dari target). Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler Kabupaten Banyuasin sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai sekitar 267.015 ha (72%) dari target 367.911 ha. LTT Padi Gogo dari target 988 ha hanya tercapai 37 ha. Seluruh target tanam pada Bulan Desember 2025 telah tercapai khususnya terkait optimalisasi lahan. Meskipun demikian, masih ada yang belum tercapai target, hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala di lapangan, seperti: saluran primer dan sekunder yang mengalami pendangkalan yang menyebabkan banjir, keterbatasan alsintan, serta mundurnya jadwal tanam akibat kondisi cuaca.

Terkait layanan dukungan manajemen internal telah dihasilkan 4 layanan, yaitu: layanan BMN, layanan hubungan masyarakat dan informasi, layanan umum, dan layanan perkantoran. Terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada tahun 2025 BBPM Pascapanen kembali menegaskan komitmennya terhadap

keterbukaan informasi publik dengan berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Capaian ini menjadi bukti konsistensi BBPM Pascapanen dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, layanan manajemen kinerja internal telah dihasilkan 1 dokumen berupa laporan layanan pemantauan dan evaluasi tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian di tahun 2025 tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Dalam rangka meningkatkan kinerja, BBPM Pascapanen berusaha meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas, meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas laboratorium; dan perbaikan website pada tampilan dan *up-dating* informasinya. Terkait dukungan anggaran, BBPM Pascapanen sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.648669/2025, tanggal 2 Desember 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp15.718.328.000,-. Selama TA. 2025, DIPA BBPM Pascapanen mengalami revisi sebanyak 20 (dua puluh kali) sehingga anggaran terakhir pada tahun 2025 senilai Rp17.249.479.000,-.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Permasalahan dan kendala di antaranya adalah beberapa kegiatan mengalami pemblokiran, terutama kegiatan PNPB. Serta adanya beberapa kali revisi anggaran karena adanya kebijakan Presiden serta kebijakan strategis Kementerian Pertanian dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hal tersebut dapat diatasi melalui upaya mengoptimalkan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada; sosialisasi kepada Penjab Kegiatan agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan; dan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pegawai agar

menyampaikan usulan matriks lebih relevan dan aplikatif mendukung prioritas dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.



Badan Perakitan dan Modernisasi Pascapanen pertanian



Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor 16114
Telp. 62.251.8321762, Fax. 62.251.8350920 Website:
<https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id>